

BAB 5

PENUTUP

5.1 Pendahuluan

Kekuatan rakyat menjadi kunci resistensi lokal dalam kaitannya dengan ekspansi modal dan regulasi negara. Ungkapan kekuatan rakyat sebagai kekuatan resistensi lokal harus dipertahankan dan disalurkan melalui perpaduan antara organisasi massa, prakarsa individu, dan organisasi sukarela. Kekuatan sosial yang dihasilkan dari resistensi ini diarahkan untuk mentransformasikan pranata-pranata kebijakan dan nilai-nilai yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan, bersifat inklusif.

Dalam kasus tambang di Manggarai, hasil yang efektif di tingkat lokal melalui resistensi lokal memerlukan kerja sama yang luas pada tiap tingkat gerakan. Kebutuhan akan jaringan kerja sama ini memunculkan kekuatan resistensi lokal yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Resistensi lokal menimbulkan aliansi kekuatan lokal berhadapan dengan negara dan korporasi. Aliansi ini mendapatkan hasil yang baik ketika muncul dukungan lebih luas terhadap resistensi lokal. Resistensi lokal dengan lingkup dan tujuan yang terutama diarahkan pada posisi negara (regulasi) dan operasi koperasi (modal-profit) mendapatkan hasil yang menentukan posisi komunitas lokal dalam hubungannya dengan negara dan korporasi.

5.2 Pencapaian

5.2.1 Kebijakan

Secara luas ada kepercayaan bahwa pembangunan di tingkat lokal menjadi tugas negara. Hal ini cenderung membenarkan dominasi negara terhadap semua aspek yang berhubungan dengan pendekatan pembangunan. Dengan cara berpikir seperti ini maka rakyat 'seolah' dituntut untuk menyerahkan kepercayaan dan sumber daya alam ke tangan pemerintah. Sebaliknya negara berjanji memberikan hasil pembangunan kepada rakyat. Salah satu hasil pembangunan yang ditempatkan dalam ukuran negara adalah pembagian pendapatan korporasi atas pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal.

Salah satu kemajuan yang lebih positif yang dicapai dalam konteks gerakan resistensi lokal dalam kasus tambang di Manggarai berkaitan dengan kebijakan umum regulasi Pemkab Manggarai.¹ Pertama, Pemkab Manggarai secara khusus mencabut izin operasi PT SJA. Kedua, Pemkab melihat kembali kebijakan memberikan izin kepada KP yang akan melakukan penyelidikan umum di kawasan ini. Ketiga, Pemkab memberikan catatan penting berkaitan dengan operasi PT ABM di Lamba Leda.

5.2.2 Hubungan Tripolar

Sama pentingnya, tetapi lebih baru, adanya pengakuan bahwa kekuatan lokal mempunyai peran pembangunan yang penting. Langkah demi langkah yang ditempuh dalam gerakan resistensi lokal memunculkan satu tahap penting berkaitan dengan dinamika hubungan tripolar negara, korporasi dan komunitas lokal. **Pertama**, pemerintah daerah mengkhuskan diri dalam penggunaan wewenang secara terbatas dengan memperhatikan dasar-dasar kebijakan aturan yang dapat diberikan kepada korporasi. Negara tidak lagi menjadi kekuatan tunggal yang secara leluasa memberikan dasar hukum untuk korporasi melakukan operasi di kawasan tambang. Daerah menjadi salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam menyusun satu kebijakan regulatif atas industri tambang.

Pengakuan akan kedudukan elemen lain menyebabkan Pemkab harus memperhitungkan langkah yang dapat diambil berkaitan dengan kebijakan tambang. Pemkab mengambil dan merealokasi kekayaan yang ada untuk tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dalam cara-cara yang tidak bisa dilakukan sektor bisnis maupun organisasi massa.

Kedua, korporasi sebagai organisasi bisnis pada mulanya mengkhuskan diri pada kekuatan ekonomi lebih memperhatikan perspektif lokal dalam keseluruhan proses investasi. Korporasi memperhatikan posisi dan kedudukan masyarakat lingkaran tambang. Terutama, korporasi menghargai kedaulatan lokal berkaitan dengan tanah dan kawasan. Selain itu korporasi mengutamakan pertimbangan ekologis dalam menyusun kerangka kerja operasi korporasi tambang di kawasan. Dalam kasus

¹Penjelasan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral, Simon F. Sembiring bahwa operasi PT Arumbai perlu ditinjau kembali keseluruhan operasinya di Reo Manggarai.

tambang di Manggarai KP melewati proses-proses yang sesuai dengan tata sosial dan adat masyarakat lokal.

Ketiga, komunitas lokal memfokuskan gerakan pada konsolidasi dan soliditas untuk memberikan kontrol dan pembatasan pada korporasi dan negara. Resistensi lokal memunculkan organisasi-organisasi sosial yang memberikan perhatian utama pada pencapaian hubungan yang lebih adil dan seimbang antara ketiga kekuatan ini.

5.2.3 Transformasi

Gerakan resistensi lokal memunculkan institusi agama,² LSM, aktivis lokal, media massa dan institusi agama yang memberikan pendidikan, pendampingan dan membukan forum-forum lokal yang secara sistematis dan kontinu mengadakan diskusi dan aksi berkaitan dengan kebijakan, operasi dan dampak industri tambang. Konsolidasi lokal mentransformasikan elemen-elemen lokal untuk mendorong resistensi yang lebih luas terhadap kebijakan dan operasi tambang.

5.2.4 Analisis

Masyarakat lingkaran tambang memiliki perubahan paradigma berkaitan dengan kebijakan dan operasi tambang.³ Perubahan paradigma dan perspektif pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam jangkauan hak ulayat atas tanah dan kawasan mereka menciptakan munculnya pemikiran dan sikap baru pada pihak masyarakat lingkaran tambang. Stakeholder lokal seperti media massa, NGO dan Institusi agama menentukan arah perubahan paradigma masyarakat lingkaran tambang berhadapan dengan negara dan korporasi tambang. Perubahan sikap terhadap PT SJA terjadi dengan drastis selama dua tahun terakhir setelah masyarakat lingkaran tambang mendapat pengetahuan dan informasi baru berkaitan dengan dampak-dampak operasi tambang.

²Institusi Agama (Katolik) melalui forum-forum pastoral dan perhatian lainnya ternyata menjadi salah satu elemen jaringan gerakan resistensi yang signifikan. Bahkan Institusi agama menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu menggerakkan perlawanan lokal secara konsisten dan terarah pada persoalan-persoalan umum terutama kehancuran dan pengingkaran hak-hak lokal. Dalam kasus tambang di Manggarai, institusi agama (hirarki Katolik) sangat menentukan dinamika hubungan antara korporasi, negara dan komunitas lokal dalam konteks tambang

³Gagasan ini dapat ditemukan dalam penjelasan Vaclav Smil. (1987). *Energy, Food, Environment: Realities, Myths, Options*. Oxford: Oxford University Press, pp. 223, 230

Studi yang dilakukan penulis menemukan bahwa bentuk-bentuk resistensi lokal yang dilakukan masyarakat lingkaran tambang bersama elemen-elemen lokal lainnya belum sepenuhnya menerjemahkan volume pengetahuan akan dampak-dampak negatif sebagai sebab-sebab fundamental yang memunculkan resistensi lokal. Pilihan-pilihan bentuk resistensi lokal belum sepenuhnya mampu menerjemahkan pengetahuan masyarakat lingkaran tambang tentang operasi korporasi tambang. Eksploitasi masif yang dilakukan PT SJA dan PT ABM belum mampu dihadapi dengan bentuk-bentuk resistensi yang efektif.

5.3 Kesimpulan Teoritik

Dinamika hubungan tripolar antara negara, korporasi dan komunitas lokal bercorak dominatif. Relasi tripolar cenderung menjadi monolitik terutama sebagai akibat dari penggabungan kekuatan negara dan korporasi. Konsolidasi regulasi dan modal dalam satu kekuatan mengakibatkan ketimpangan hubungan tripolar. Relasi menjadi monolitik. Negara dan korporasi mendominasi hubungan dengan komunitas lokal.

Resistensi lokal merupakan koreksi terhadap pola hubungan monolitik dan timpang antara negara, korporasi dan komunitas lokal. Namun, resistensi sebagai mekanisme lokal berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik dan budaya lokal. Karakter lokal akan menentukan resistensi yang dapat mempengaruhi deskripsi hubungan tripolar.

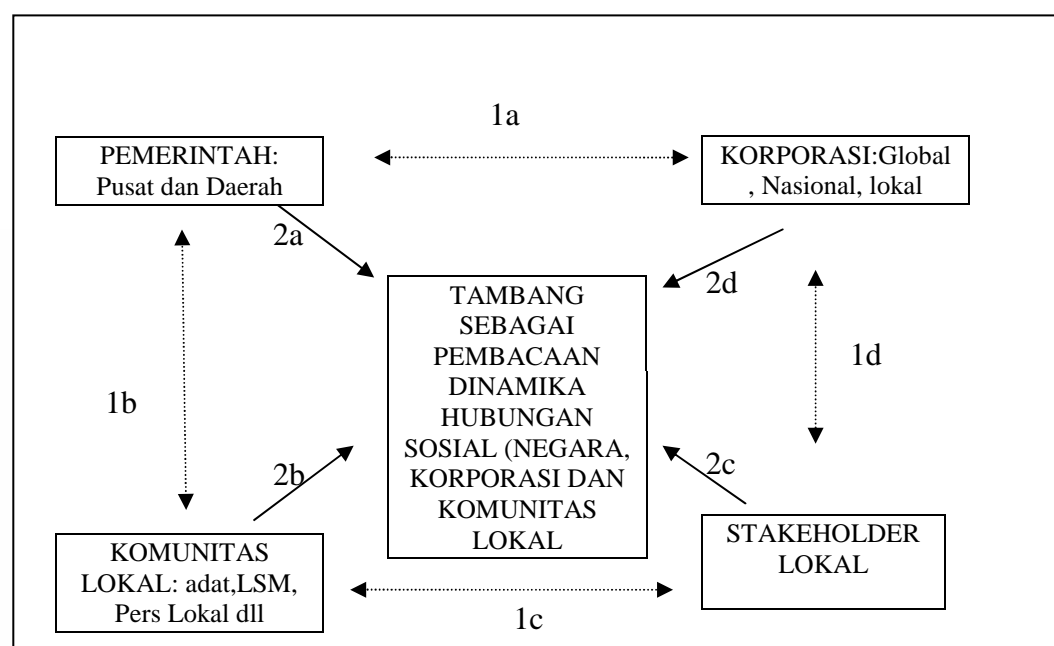
Resistensi berpeluang muncul dalam bentuk konflik dan kekerasan. Dalam kerangka ini, pendekatan multi-aspek dengan partisipasi multi-stakeholder akan mendorong keberhasilan resistensi sebagai bagian dari pertahanan lokal untuk menghadapi dominasi korporasi dengan jaminan regulasi negara. Ini akan menjadi sebagian dari usaha untuk mengembalikan posisi 'lokal' dalam keseluruhan konteks hubungan tripolar yang lebih seimbang.⁴

Kehadiran elemen-elemen lokal lain berpeluang memecahkan kekuatan yang terpusat pada korporasi dan negara. Hal ini akan memudahkan komunitas lokal

⁴Kecenderungan terjadinya konflik disebabkan resistensi yang hanya menggunakan perspektif sempit dari komunitas lokal. Lihat, A.A. Churchill, "Energy Demand and Supply in the Developing World, 1990 – 2020: Three Decades of Explosive Growth," in *Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics*, 1993, ed. M. Bruno and B. Pleskovic (Washington, D.C.: World Bank, 1994), pp. 441-61

menemukan ruang yang lebih luas dan adil untuk memasukan kepentingan dan kebutuhan dalam dinamika hubungan tripolar.

Gambar 5.1 Dinamika Hubungan Tripolar



Pola relasi tripolar dalam konteks tambang di Manggarai mengalami perubahan dan dinamika dengan kehadiran elemen-elemen lain. Dinamika hubungan tripolar (**gambar 5.2**) ditentukan peran elemen-elemen lokal (**2c,1d**). Kekuatan monosentris yang terpusat pada korporasi dan negara terbagi ke dalam beberapa bagian kekuatan lain seperti kelompok NGO, intelektual lokal, media massa dan institusi agama.

Elemen-elemen ini tidak serta merta dimasukkan dalam kekuatan komunitas lokal. Alasan paling kuat adalah bahwa elemen-elemen ini justru memberikan pengaruh besar pada relasi tripolar terutama dalam konteks dominasi negara dan korporasi terhadap komunitas lokal (**lihat gambar 2.1. dan gambar 2.2**).

Dinamika tripolar dengan munculnya elemen stakeholder lokal merupakan kekuatan utama yang muncul dalam studi tambang dan resistensi lokal di Manggarai. Beberapa gejala yang cukup kuat muncul dalam konteks persoalan ini nampak dalam bentuk resistensi lokal tanpa kekerasan yang dapat memicu konflik luas. Posisi stakeholder lokal dapat mengurangi lonjakan konflik antara negara, korporasi dan masyarakat lingkaran tambang. Stakeholder lokal (utama) tidak bisa sepenuhnya berada

pada posisi masyarakat lingkaran tambang karena dengan posisi dan peran yang lebih luas akan memberikan keleluasaan bagi stakeholder utama untuk membuka relasi dengan negara dan korporasi. Relasi ini dalam konteks tertentu dapat diartikan dengan tekanan-tekanan yang dapat diberikan kepada negara dan korporasi.

Dinamika hubungan tripolar dengan peran beberapa elemen lokal yang cukup dominan ternyata belum sepenuhnya mampu memberikan pencapaian secara signifikan dalam persoalan penyelesaian di tingkat lokal. Studi yang dilakukan penulis menemukan kenyataan bahwa dinamika resistensi belum memberikan hasil akhir yang lebih seimbang dan adil dengan pola dinamika hubungan yang belum terfokus. Khususnya berkaitan dengan elemen-elemen lokal yang sangat dominan dengan kapasitas sosial dan budaya yang besar.

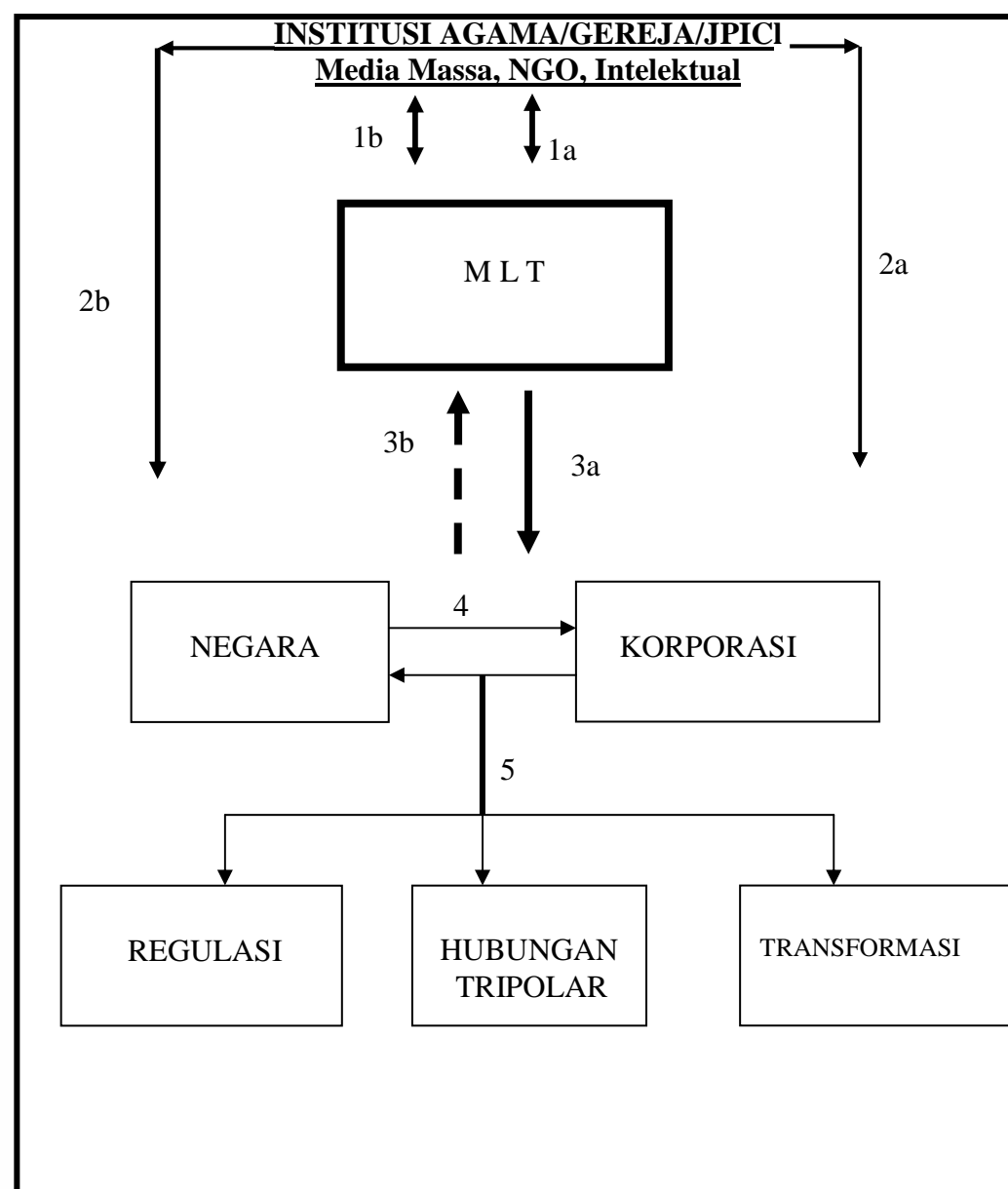
Kehadiran elemen (stakeholder) utama memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi komunitas lokal untuk memperjuangkan aspek-aspek lokal seperti kepentingan, hak-hak sosial, budaya dan ekonomi maupun prinsip 'keberlanjutan' lokal yang harus diperhatikan negara dan korporasi.

Stakeholder utama membantu korporasi, negara dan komunitas lokal menemukan agenda bersama dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perspektif kepentingan lokal.⁵ Mekanisme ini akan menghindarkan pengelolaan sumber daya alam secara masif dengan mengutamakan orientasi keuntungan pihak korporasi semata. Stakeholder utama berperan 'menekan' korporasi dan negara yang memiliki kapasitas dominan untuk menentukan hubungannya dengan komunitas lokal.

Resistensi lokal 'membutuhkan' kehadiran elemen utama untuk membantu menemukan pola yang tepat maupun menambah 'kekuatan' masyarakat lingkaran tambang. Penulis menyimpulkan dari studi lapangan yang dilakukan bahwa Institusi agama (Gereja Katolik) merupakan '*stakeholder utama*' dalam kerangka dinamika hubungan tripolar. Penulis menemukan kenyataan bahwa peran elemen utama ini memunculkan implikasi yang signifikan pada pencapaian resistensi sekaligus proses yang mengutamakan gerakan tanpa kekerasan. Hubungan tripolar dengan resistensi sebagai kunci dinamikanya tidak berkembang menjadi konflik dan kekerasan antara ketiga kekuatan ini.

⁵ Jeffrey Leonard. (1989). "Overview," in *Environment and the Poor: Development Strategies for a Common Agenda*, New Brunswick: N.J.: Transaction, pp. 5-7

Gambar 5.2. Posisi Institusi Gereja Katolik



→ : KUAT
 - - - - - : LEMAH

Penulis menemukan peran signifikan Institusi Gereja Katolik (**gambar 5.2.**). Pertama, Gereja Katolik berperan untuk mendampingi masyarakat lingkaran tambang terutama dalam proses pendidikan akan hak-hak sosial, budaya dan ekonomi (**1a,1b**). Hal ini memperkuat posisi masyarakat lokal terhadap kehadiran korporasi dan negara (**3a**). Posisi masyarakat lingkaran tambang yang semakin kuat dan pengaruh Gereja Katolik untuk mengontrol korporasi dan negara (**2a,2b**) mempengaruhi posisi negara

dan korporasi terhadap masyarakat lingkaran tambang (3b). Pola hubungan ini di mana Gereja Katolik muncul sebagai stakeholder utama dalam konteks resistensi lokal mendorong terciptanya beberapa pencapaian: regulasi, hubungan tripolar, transformasi.

Institusi Gereja Katolik membuka diskusi dengan negara dan korporasi. Pertimbangan-pertimbangan utama seperti prinsip keberlangsungan, keadilan dan kehidupan menjadi hal-hal utama yang diperjuangkan Institusi Gereja Katolik dalam dinamika hubungan dengan negara dan korporasi. Peran Institusi Gereja Katolik (Gambar 5.2) menentukan posisi negara, korporasi dan MLT. Peran ini menyebabkan berkurangnya dominasi negara dan korporasi terhadap MLT.

Perubahan pola hubungan tripolar ini memberikan beberapa pokok pikiran penting. *Pertama*, teori pembangunan yang dipakai sebagai titik tolak yang dipakai dalam studi ini tidak berlaku sepenuhnya. Gagasan-gagasan yang diajukan beberapa pemikir dalam studi ini (gambar 2.2 dan gambar 2.3) hanya berlaku dalam konteks hubungan tripolar seimbang tanpa munculnya relasi dominatif.

Studi tentang resistensi lokal dan tambang di Manggarai menegaskan kelemahan mendasar perspektif teoritik hubungan tripolar untuk menjelaskan persoalan-persoalan dengan karakter lokal yang kuat. Pendekatan tripolar tidak bisa menjangkau kedalaman dan keluasan kompleksitas persoalan lokal yang berhubungan dengan banyak aspek sosial, budaya, dan politik khas lokal.

Pandangan *Polanyi* yang dikutip dalam studi ini dapat menjelaskan munculnya resistensi lokal sebagai akibat munculnya ketimpangan pembagian keuntungan dan ekspansi modal masif. Demikianpun pendapat *Sen* yang diangkat dalam studi ini bisa dijadikan titik tolak untuk menelaah lebih jauh munculnya resistensi lokal sebagai akibat dari perbedaan kapasitas dan kesempatan antara negara, korporasi dan komunitas lokal (MLT).

Sebuah kesimpulan dapat ditegaskan bahwa kerangka hubungan tripolar belum memadai sebagai perspektif teoritik untuk menelaah kompleksitas pembangunan lokal terutama kasus tambang di Manggarai, Flores, NTT. Pola hubungan tripolar cenderung dominatif terhadap komunitas lokal tanpa kehadiran elemen-elemen lokal secara signifikan. Ada elemen lain yang harus diperhatikan

dalam kerangka dinamika tripolar: negara, korporasi dan komunitas lokal untuk kasus tambang di Manggarai.

Kedua, studi tentang resistensi lokal dalam konteks tambang dapat diletakkan dalam kerangka untuk memeriksa dan mengoreksi aktualitas ekspansi investasi modal dan akumulasi keuntungan yang mengerucutkan kekuasaan korporasi. Pengerucutan kekuasaan yang memberikan perilaku dominatif korporasi dan komunitas lokal.⁶

Industri tambang yang sedang beroperasi di Manggarai membenarkan teori akumulasi keuntungan dan kekuasaan ini. Keuntungan yang semakin besar dengan volumen kesejahteraan yang tidak signifikan menegaskan akumulasi masif keuntungan korporasi dari pengelolaan sumber daya alam di Manggarai. Namun, resistensi lokal merupakan sebuah koreksi atas akumulasi modal, keuntungan dan kekuasaan dominatif korporasi terhadap masyarakat lingkaran tambang.

Ketiga, resistensi lokal selalu mengandaikan munculnya stakeholder utama sehingga resistensi dapat mencapai tujuan dengan bentuk dan cara tanpa kekerasan. Resistensi menjadi satu bagian tata kelola sosial masyarakat lokal berhadapan dengan negara dan korporasi. Studi lapangan menegaskan bahwa stakeholder utama menentukan intensitas dan volume resistensi masyarakat lingkaran tambang terhadap regulasi dan pola operasi korporasi tambang.

Ketiga, persoalan tambang di Manggarai, Flores, NTT membenarkan munculnya Institusi Gereja Katolik sebagai stakeholder utama. Hal ini yang menyebabkan pembacaan atas persoalan tambang tidak cukup dengan memakai kerangka hubungan tripolar. Peran stakeholder utama menjadi bagian penting dari keseluruhan studi resistensi lokal di Manggarai.

Posisi utama Institusi Gereja Katolik terutama berhubungan dengan prinsip-prinsip utama seperti keberlangsungan, kesejahteraan, keadilan dan kehidupan. Prinsip-prinsip ini melampaui kepentingan-kepentingan parsial yang dimiliki negara, korporasi maupun masyarakat lingkaran tambang. Institusi Gereja Lokal memiliki kekuatan sosial yang dapat menentukan pola hubungan tripolar baru. Posisi Gereja

⁶Pandangan ini dianalisis secara lengkap oleh Dody Prayogo berdasarkan penjelasan teoritik yang dikemukakan oleh Warrick Armstrong and T.G. McGee, *Theatres of Acumulation, Studies in Asia and Latin American Urbanization, Methuen, 1985* lihat Dody Prayogo .(2008). *Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal (Sebuah Kasus Empirik pada Industri Geotermal di Jawa Barat*. Depok: Fisip UI Press.

lokal melebihi peran yang dapat ditunjukkan NGO, pers lokal maupun kelompok intelektual. Elemen-elemen lain di luar Institusi Gereja Lokal tidak memiliki pola sistematis untuk membentuk resistensi lokal yang efektif terutama bentuk gerakan yang tidak mengutamakan kekerasan.

Gagasan ini mendorong adanya pola pembangunan lokal yang lebih integral. Alberto Melucci menegaskan bahwa keberanian dan harapan selalu melindungi manusia dalam membangun sejarah yang mengutamakan kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan⁷Gagasan penting ini akan mendapatkan tekanan positif jika pembangunan disadari sebagai sebuah tanggung jawab bersama.⁸

Pembangunan sebagai tanggung jawab bersama merupakan nilai etis proses pembangunan. Implementasi paling fundamental atas tanggung jawab bersama ini adalah kehadiran semua kekuatan asyarakat dalam proses pembangunan. Semua elemen sosial menjadi subyek pembangunan. Pembangunan harus berasal dari kebutuhan rakyat.⁹

Orientasi pembangunan harus disusun secara baru. Pendekatan pembangunan monolitis¹⁰ yang selama ini selalu menjadi prioritas penguasa harus bisa direformasi dengan bentuk pembangunan partisipatoris.¹¹ Masyarakat menjadi elemen penting untuk mendukung proses pembangunan. Dominasi negara dalam merancang dan melaksanakan pembangunan justru mematikan keberadaan komunitas rakyat.

Namun keadaan ini merupakan dilema dalam melakukan perubahan orientasi politik pembangunan.¹² Di sini, sesungguhnya sudah terkandung dua prinsip penting dalam proses pembangunan yaitu isi dari politik pembangunan yang mengacu pada pengurangan kemiskinan dan konteks pembangunan yang mengacu pada realitas

⁷ Melucci, Alberto. (1996) *The Playing Self: Person and Meaning in The Planetary Society*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 130, 154

⁸ Ananta kumar Giri & Philip Quarles Van Ufford. (2004). *Kritik Moral Pembangunan (ed)*. Jogjakarta: Kanisius, pp. 393 - 426

⁹ Jacques Maritain. (1998). *Man and State*. Chicago: Chicago University Press, pp. 11 - 15

¹⁰ Elizabeth Harrison – *Mesin Pembangunan Monolitis* – dalam Philip Quarles Van Ufford & Ananta Kumar Giri. 2004 *Kritik Moral Pembangunan (ed)*. Jogjakarta: Kanisius, pp. 160 - 170

¹¹ David Mosse – *Pembangunan Partisipatoris* - dalam Philip Quarles Van Ufford & Ananta Kumar Giri. 2004 *Kritik Moral Pembangunan (ed)*. Jogjakarta: Kanisius, pp. 74 - 90

¹² Kecerdasan mengatasi dilema-dilema dalam pembangunan dikemukakan oleh Alberto Melucci. 1996 *The Playing Self: Person and Meaning in The Planetary Society*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 130, 154

kemiskinan. Dua prinsip ini menjadi bahan pertimbangan penting untuk mengukur keberhasilan strategi pembangunan.¹³

Pada aras konsepsional, dibutuhkan keseriusan melakukan transformasi paradigma pembangunan secara menyeluruh dengan menyentuh semua aspek yaitu komunitas masyarakat, pasar, maupun pemerintah. Pada bagian ini sejumlah persoalan mendesak perlu mendapatkan perhatian tiga kekuatan ini.¹⁴ Dengan posisi seperti ini maka komunitas lokal dapat membalikkan apa yang dikatakan **Perkins** bahwa operasi politik ekonomi global yang hadir hingga ke pelosok-pelosok dunia merupakan strategi penghancuran dunia dan manusia.¹⁵

5.4 Rekomendasi

5.4.1 Rekomendasi bagi negara

1. Negara harus mempertimbangkan aspek topografi daerah Manggarai yang rawan bencana lingkungan. Dalam menentukan kebijakan pertambangan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah memperhitungkan dimensi sosial, budaya, ekonomi dan religius yang merupakan elemen dasar dari kehidupan manusia Manggarai. Negara harus membuat kajian integral dan komprehensif berkaitan dengan proses pemberian izin KP. Terutama memperhatikan aspek kepentingan lokal (Masyarakat lingkaran tambang).
2. Negara perlu memikirkan untuk menanggihkan pemberian kebijakan pertambangan. Pemerintah Kabupaten perlu mengkaji ulang kebijakan serta asumsinya bahwa pertambangan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Manggarai.
3. Negara harus menyusun regulasi yang kuat dalam bidang pertambangan terutama untuk melindungi kepentingan komunitas lokal. Negara harus melakukan konsultasi publik yang transparan dan akuntabel tentang

¹³ Gagasan ini dikembangkan oleh Merilee Grindle. (1980). *Policy Content and Context in Implementation in The Third World*. Princeton: Princeton University Press, pp. 3 - 39

¹⁴M.R. Redclift, (1985) *Policy Research and Antropological Compromise – in* Ralph Grillo & Alan Rew (ed). *Social Anthropology and Development Policy*. London: Tavistoch. pp. 198 - 202

¹⁵Persoalan ini dibahas dengan lengkap dalam John Perkins. (2004). *Confessions of Economic Hit Man*, Berret-Koehler Publisher, Inc

kebijakan pertambangan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

4. Negara harus melibatkan kelompok-kelompok sosial seperti NGO, kelompok advokasi dan Institusi Agama (Gereja Katolik) dalam menyusun format kebijakan pertambangan yang tepat.

5.4.2 Rekomendasi bagi Korporasi

1. Korporasi harus menunjukkan transparansi operasi tambang. Ini menunjuk pada persoalan-persoalan mendasar seperti areal operasi, bahan galian, dampak-dampak ekologis yang akan ditimbulkan terhadap keberadaan masyarakat lingkr tambang.
2. Korporasi harus mampu mengubah keyakinan palsu bahwa mereka mampu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Korporasi harus menempatkan komunitas lokal sebagai bagian penting pertimbangan operasi tambang.
3. Korporasi mengutamakan proses pengelolaan sumber daya yang memperhatikan aspek '*pertumbuhan*' komunitas lokal dan '*pemerataan*' pendapatan yang mendorong kesejahteraan dan kemakmuran lokal.
4. Korporasi harus menjalankan program CSR yang sistematis dan kontinu sehingga masyarakat lingkaran tambang bisa melakukan proses rehabilitasi kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan ekologis.

5.4.3 Rekomendasi bagi Komunitas Lokal

1. Komunitas lokal (MLT) harus membangun konsolidasi internal yang kuat terutama berkaitan dengan persoalan hak ulayat atas kawasan. Konsolidasi ini dapat dilakukan terutama dengan revitalisasi tata kelola sosial budaya.
2. Komunitas lokal (MLT) membuka hubungan yang lebih intensif dengan stakeholder lokal yang memiliki kapasitas untuk mendorong terbentuknya resistensi yang kuat terhadap korporasi.
3. Komunitas lokal harus mendorong terciptanya partisipasi multi pihak dalam merumuskan visi pengelolaan sumber daya yang mempertimbangan prinsip keberlangsungan hidup.
4. Komunitas lokal membentuk sikap kritis terhadap kehadiran korporasi. Komunitas lokal harus memberikan tinjauan komprehensif atas kehadiran

korporasi untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat lokal (MLT).

5.4.4 Rekomendasi untuk Institusi Gereja Katolik

1. Institusi Gereja Katolik harus menumbuhkan keprihatinan pada persoalan-persoalan sosial, politik, ekonomi yang memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat lokal.
2. Institusi Gereja Katolik mempertahankan intensitas hubungan positif dengan negara, korporasi dan komunitas lokal sehingga mampu mengaktualisasikan pola pembangunan yang mementingkan masyarakat lokal.
3. Institusi Gereja Katolik harus merincikan prinsip-prinsip keberlangsungan, keadilan dan pemerataan dalam kegiatan-kegiatan konkret yang dapat dilakukan negara, korporasi dan komunitas lokal.

Demikian kesimpulan-kesimpulan penting yang dapat diajukan dari keseluruhan proses studi ini. Ada banyak temuan penting yang dapat ditegaskan dalam studi ini terutama pengembangan model hubungan antara elemen-elemen penting dalam politik dan praktek pembangunan di tingkat lokal. Karakter lokal menentukan penyelesaian persoalan ketimpangan hubungan, keterancaman ekologis, kemiskinan maupun ketidakadilan ekonomi yang muncul sebagai akibat ekspansi investasi korporasi tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal.

Ada banyak keterbatasan teoritik dan metodologik yang digunakan dalam studi ini. Tidak semua persoalan dapat diolah dengan baik dalam studi ini. Ada banyak hal lain yang belum dijelaskan secara menyeluruh dan mendalam. Keterbatasan ini dapat menjadi titik tolak studi yang lebih komprehensif dengan melihat variasi konteks sosial, politik dan budaya lokal yang mempengaruhi dinamika hubungan tripolar.

Studi ini mendorong penyelesaian persoalan pada jangka pendek terutama bagaimana menghasilkan peta hubungan tripolar yang dapat mendukung keberlangsungan hidup komunitas lokal berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan dan kemakmuran. Selain itu, temuan-temuan yang diajukan di sini dapat menjadi

landasan penting untuk melakukan studi yang lebih komprehensif dalam konteks praktek pembangunan lokal.

Pemikiran-pemikiran yang muncul dalam keseluruhan penelitian ini menegaskan satu kebutuhan agar Sosiologi tidak hanya sebatas sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang menjelaskan dan mengevaluasi gejala-gejala sosial di tengah masyarakat melainkan memiliki 'intensi' kuat untuk mendorong terbentuknya mekanisme pembangunan yang mengutamakan kehidupan, lingkungan dan kemanusiaan. Dengan demikian studi ini dapat menjadi '*kerangka perjuangan*' untuk menegakkan keberlangsungan ekologi dan manusia.



REFERENSI

Internet